

Nomor Surat	014/Ext-WMI/V/2026
Nama Perusahaan	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Kode Emiten	SQMI
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa

Permintaan Penjelasan Bursa

Sehubungan dengan Surat Bursa No.: S-06326/BEI.PP3/05-2026 (Surat Bursa S-06326) tertanggal 26 Mei 2026 yang ditujukan kepada Direksi PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (Direksi Perseroan) perihal Permintaan Penjelasan Bursa.

Bersama ini kami sampaikan tanggapan atas Surat Bursa S-06326.

In connection with the IDX Letter No.: S-06326/BEI.PP3/05-2026 (IDX Letter S-06326) dated 25 May 2026, addressed to the Board of Directors of PT Wilton Makmur Indonesia Tbk regarding the explanations requested by IDX.

We hereby submit the response to IDX Letter S-06326.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Mohammad Noor Syahriel

Corporate Secretary

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5 Jl. Mangga dua Raya,

Telepon : (62) 21-612 5585, Fax : (62) 21-612 5583, -

Nama Pengirim	Mohammad Noor Syahriel
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-05-2026 22:58
Lampiran	1. 26-05-29 Response to IDX Letter S-06326.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wilton Makmur Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wilton Makmur Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Ref. No. 014/Ext-WMI/V/2026

Jakarta, 29 Mei 2026

Kepada Yang Terhormat:

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 4

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Perihal : Tanggapan atas Surat Bursa S-02237 perihal Permintaan Penjelasan Bursa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Bursa No.: S-06326/BEI.PP3/05-2026 ("**Surat Bursa S-06326**") tertanggal 26 Mei 2026 yang ditujukan kepada Direksi PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. ("Direksi Perseroan") perihal Permintaan Penjelasan Bursa.

Bersama ini kami sampaikan tanggapan atas Surat Bursa S-06326 sebagai berikut:

Merujuk pada pemberitaan media massa Kompas tanggal 22 Mei 2026 terkait rencana Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA dan rencana Pemerintah Indonesia untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor, dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Sehubungan dengan rencana Pemerintah terkait penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, bagaimana Perseroan menyikapi rencana atas penerapan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam tersebut?

Tanggapan:

Grup ini mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah. Grup memahami bahwa Pemerintah memperkenalkan peraturan ini terutama untuk tujuan stabilitas fiskal negara.

Pada tahap ini, Grup akan terus mengamati dengan cermat implementasi kebijakan peraturan dan menilai kembali dampaknya terhadap aktivitas operasional dan posisi keuangan Grup.

2. Dalam hal terdapat pendapatan/penjualan ekspor dari Perseroan, agar disampaikan dampak yang dapat terjadi bagi Perseroan atas rencana tersebut, antara lain:

- a. Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Tanggapan:

Tidak ada dampak langsung terhadap kelangsungan bisnis Grup mengingat implementasi awal tidak memengaruhi penambang emas.

Namun, jika implementasi tersebut diterapkan pada penambang emas, pasar ekspor mungkin akan mencari alternatif lain jika mereka tidak menyetujui harga yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Negara. Hal ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi penjualan Grup.

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A

Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia

Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586

612 5587, 612 5588

Fax. (+62 21) 612 5583

- b. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.

Tanggapan:

Tidak ada dampak langsung pada aktivitas operasional Grup yang ada karena implementasi awal tidak memengaruhi penambang emas.

Namun, jika implementasi tersebut diperkenalkan kepada penambang emas, keterlibatan Badan Usaha Milik Negara berpotensi menimbulkan persyaratan persetujuan tambahan (misalnya volume dan harga). Penundaan apa pun dapat mengakibatkan biaya tambahan yang akan ditanggung oleh Grup.

- c. Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama dampak terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih dan arus kas Perseroan.

Tanggapan:

Tidak ada dampak langsung pada kondisi keuangan Grup saat ini mengingat implementasi awal tidak memengaruhi penambang emas.

Namun, jika implementasi tersebut diterapkan pada penambang emas, Grup memperkirakan margin akan lebih tipis mengingat biaya operasional secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat.

- d. Dampak terhadap perjanjian kerjasama dengan pelanggan eksisting Perseroan.

Tanggapan:

Tidak ada dampak pada perjanjian kerja sama dengan pelanggan Grup yang sudah ada.

- e. Dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan Perseroan, (jika ada).

Tanggapan:

Tidak ada dampak terhadap pemenuhan kewajiban dan perjanjian yang timbul dari perjanjian pembiayaan yang ada pada Grup.

- f. Risiko hukum, seperti risiko wanprestasi kontrak.

Tanggapan:

Tidak ada risiko hukum langsung terhadap kewajiban kontraktual Grup yang ada saat ini, mengingat implementasi awal tidak memengaruhi penambang emas.

Namun, Grup akan menilai implikasi yang timbul dari pengaturan di masa mendatang (yaitu perjanjian pembelian/off take).

Situasinya mungkin lebih rumit jika perjanjian kontraktual ini dibuat oleh perusahaan induk yang berbasis di luar negeri dan di mana perjanjian kontraktual tersebut diatur oleh hukum yurisdiksi asing.

- g. Dampak lainnya (jika ada).

Tanggapan:

Tidak ada dampak potensial langsung berdasarkan situasi Grup saat ini mengingat implementasi awal belum memengaruhi bisnis pertambangan emas.

Namun, Grup memperkirakan jika terdampak, bahwa mungkin akan terpapar fluktuasi harga karena masih belum jelas bagaimana bisnis dapat melakukan lindung nilai terhadap pergerakan harga mengingat adanya mekanisme penetapan harga variabel yang dikendalikan secara ketat oleh Badan Usaha Milik Negara.

Paparan tersebut diperkirakan akan lebih besar ketika implementasi beralih dari model jual-melalui (sell-through) ke model jual-ke-beli (sell-to).

3. Strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, termasuk rencana tindakan korporasi yang akan dilakukan (jika ada), serta lini masa (timeline) dari rencana tersebut.

Tanggapan:

Grup akan terus mengamati perkembangan implementasi dengan cermat sebelum menentukan sikap atau kebijakan lebih lanjut. Belum ada langkah korporasi yang direncanakan dalam waktu dekat.

Demikian disampaikan. Atas segala perhatian dan bimbingan yang senantiasa diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk



Oktavia Budi Raharjo
Direktur Utama

Letter / Announcement No.	014/Ext-WMI/V/2026
Issuer Name	Wilton Makmur Indonesia Tbk
Issuer Code	SQMI
Attachment	1
Subject	Explanation for Request for Explanation Of Indonesia Stock Exchange

Request for Explanation from the Exchange

Sehubungan dengan Surat Bursa No.: S-06326/BEI.PP3/05-2026 (Surat Bursa S-06326) tertanggal 26 Mei 2026 yang ditujukan kepada Direksi PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (Direksi Perseroan) perihal Permintaan Penjelasan Bursa.

Bersama ini kami sampaikan tanggapan atas Surat Bursa S-06326.

In connection with the IDX Letter No.: S-06326/BEI.PP3/05-2026 (IDX Letter S-06326) dated 25 May 2026, addressed to the Board of Directors of PT Wilton Makmur Indonesia Tbk regarding the explanations requested by IDX.

We hereby submit the response to IDX Letter S-06326.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Mohammad Noor Syahriel

Corporate Secretary

Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5 Jl. Mangga dua Raya,

Phone : (62) 21-612 5585, Fax : (62) 21-612 5583, -

Sender Name	Mohammad Noor Syahriel
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-05-2026 22:58
Attachment	1. 26-05-29 Response to IDX Letter S-06326.pdf

This is an official document of Wilton Makmur Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Wilton Makmur Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Ref. No. 014/Ext-WMI/V/2026

Jakarta, 29 May 2026

To:

Managing Director of PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 4

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Attention: **Head of Listing Division 3**

Re : Response to IDX Letter S-06326 regarding the explanations requested by IDX

Dear Sir/Madam,

In connection with the IDX Letter No.: S-06326/BEI.PP3/05-2026 ("**IDX Letter S-06326**") dated 25 May 2026, addressed to the Board of Directors of PT Wilton Makmur Indonesia Tbk regarding the explanations requested by IDX.

We hereby submit the response to IDX Letter S-06326 as follow:

With reference to the Kompas news article dated 22 May 2026, regarding the planned issuance of a Governmental Regulation ("**PP**") on Natural Resource Export Governance and the Indonesian Government's plan to establish a State-Owned Enterprise (BUMN) dedicated to exports, the following below is the response to the request for explanation on the following matters:

1. In relation to the Government's plan to issue a PP on Natural Resource Export Governance, how does the Group view and respond to the planned implementation of this PP?

Response:

The Group appreciates and supports the measures undertaken by the Government. The Group understands that the Government is introducing this regulation primarily for the purpose of state fiscal stability.

At this stage, the Group will continue to closely observe the implementation of the regulatory policies and re-assess the impact to the Group's operational activities and financial position.

2. In the event that the Group generates export revenue/sales, please describe the potential impacts of this plan on the Group, including, but not limited to:

- a. The impact on the Group's business continuity.

Response:

There is no immediate impact on the Group's business continuity given that the initial implementation does not affect gold miners.

However, in the event that such an implementation would be introduced to gold miners, the export markets may look elsewhere for alternatives if they do not agree on the pricing stipulated by the State-Owned Enterprise. This, may in turn, affect the sales of the Group.

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk

Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A

Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia

Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586

612 5587, 612 5588

Fax. (+62 21) 612 5583

- b. The impact on the Group's operational activities.

Response:

There is no immediate impact on the Group's existing operational activities given that the initial implementation does not affect gold miners.

However, in the event that such an implementation would be introduced to gold miners, the involvement of the State-Owned Enterprise would potentially create a requirement for additional clearance (e.g. volume and pricing). Any delays may result in additional costs that will be incurred by the Group.

- c. The impact on the Company's financial condition, particularly on revenue, operating profit, net profit, and cash flow.

Response:

There is no immediate impact on the Group's existing financial condition given that the initial implementation does not affect gold miners.

However, in the event that such an implementation would be introduced to gold miners, the Group expects that margins will be thinner given that overall operational costs are expected to increase.

- d. The impact on cooperation agreements with the Group's existing customers.

Response:

There is no impact on cooperation agreements with the Group's existing customers.

- e. The impact on the fulfilment of obligations and covenants in the Group's financing agreements (if any).

Response:

There is no impact on the fulfilment of obligations and covenants arising from the Group's existing financing agreements.

- f. Legal risks, including the risk of contractual default.

Response:

There is no immediate legal exposure on the Group's existing contractual obligations given that the initial implementation does not affect gold miners.

However, the Group will assess the implications arising from future term arrangements (i.e. offtake agreements).

The situation may be more complicated if these contractual agreements are entered into by the holding companies that are based abroad and whereby the contractual agreements are governed under the laws of foreign jurisdictions.

- g. Any other potential impacts (if any).

Response:

There are no immediate potential impacts based on the existing situation of the Group given that the initial implementation does not affect gold miners.

However, the Group expects that it may be exposed to pricing fluctuations as it is still unclear on how businesses will be able to hedge against price movements given that there is a variable pricing mechanism that is controlled strictly by the State-Owned Enterprise.

The exposure is expected to be greater when the implementation transits from a sell-through model to a sell-to model.

3. The Company's strategy to mitigate the impact of this Government policy, including any planned corporate actions (if any), as well as the timeline for the implementation of such plans.

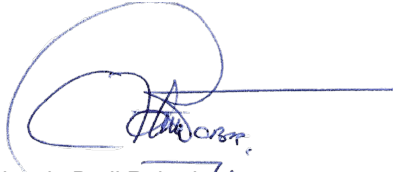
Response:

The Group will continue to closely observe the implementation developments before determining any further stance or policy. There are no immediate planned corporate actions.

Thank you for your attention.

Sincerely,

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk



Oktavia Budi Raharjo
President Director